

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Efektif

Pashya Niasty Putri Pasaribu¹, Hashifa Nuri², Muhammad Arsyah³, Mariana Mariana⁴

Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia^{1,2,3,4}

putripasyah@gmail.com¹, hashifanuri@gmail.com², muhammadarsyah0456@gmail.com³, mariana@pnl.ac.id⁴

Diserahkan tanggal 10 September 2024 | Diterima tanggal 23 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

Abstract:

This study aims to analyze the role of Leadership, Government Accounting Standards (SAP), and Public Participation in improving the accountability of regional financial management. The method used in this study is a literature review involving the collection and analysis of previous research related to the effective implementation of SAP and financial report transparency in the management of regional budgets. The results of the study indicate that leadership with integrity, the quality implementation of SAP, and active public participation play crucial roles in creating financial accountability at the regional level. Ethical leadership can promote accountability principles in financial management, while the effective implementation of SAP results in transparent and trustworthy financial reports. Furthermore, public participation in financial oversight increases government responsibility and strengthens the accountability system. Therefore, this study recommends reinforcing these three factors as strategic steps to achieve better and sustainable regional financial management.

Keywords: Regional Financial Accountability, Government Accounting Standards, Public Participation

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepemimpinan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai penelitian terdahulu terkait penerapan SAP yang efektif dan transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, penerapan SAP yang berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas keuangan daerah. Kepemimpinan yang beretika dapat mendorong prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sementara penerapan SAP yang efektif menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan meningkatkan tanggung jawab pemerintah dan memperkuat sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penguatan ketiga faktor tersebut sebagai langkah strategis untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Bentuk perwujudan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan. Hasil akhir dari tahap identifikasi, pencatatan, dan pengukuran dari berbagai transaksi oleh instansi pemerintah dituangkan dalam laporan keuangan, yang menjadi sumber informasi untuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan dan acuan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Basak et al., 2022; Benito et al., 2016; Dewi, 2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Latifah, 2015).

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan (Albugis, 2016; Liza & Mariana, 2023; Ramadana et al., 2023).

Rendahnya akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia, seperti yang tercermin dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya angka temuan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, masih menjadi tantangan serius. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel masih kurang optimal di banyak daerah. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang berintegritas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat memiliki potensi besar untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis akrua diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yakni memberikan bukti empiris peningkatan kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi. Kontribusi praktis penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah (Latifah, 2015). Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepemimpinan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi bagaimana penerapan SAP yang efektif dapat memperbaiki akuntabilitas keuangan daerah dan memperkuat transparansi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian perpustakaan atau disebut pula dengan literatur review yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penulisan secara terperinci, spesifik, dan mudah direpresentasikan dalam menganalisis hasil penelitian atau pemahaman yang telah dilakukan oleh peneliti yang disebut sebagai literatur review (Hendra et al., 2024; Mariana, 2024; Mariana et al., 2024; Mariana & Safrijal, 2024; Maulena et al., 2023; Rahmatullah et al., 2023). Menganalisis dan menggabungkan informasi serta pengetahuan yang ada pada topik permasalahan yang sedang diteliti guna mencari titik pembaruan untuk penelitian selanjutnya kita harus menggunakan metode literatur review. Digunakannya metode ini untuk membantu mengetahui teori dasar penelitian yang tengah digunakan, topik yang dibahas untuk menganalisis keterbatasan dan perluasan penelitian, memberikan jawaban pada permasalahan yang tengah dihadapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Jurnal meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah yang efektif yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari hasil penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan kata kunci meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah. Pencarian jurnal ini di website Google Scholar (Mariana et al., 2020; Maulena et al., 2023; Nufiar et al., 2020; Zhul et al., 2024).

Langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan data dimulai dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi jurnal (Erbara & Takdir, 2022). Jurnal yang termasuk dalam kriteria inklusi adalah yang membahas peningkatan akuntabilitas keuangan daerah serta penerapan standar akuntansi pemerintah, dengan periode publikasi antara tahun 2020 hingga 2024. Ada beberapa jurnal yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak terbit dalam jurnal terindeks, atau memiliki kualitas metodologi yang rendah dikeluarkan dari pertimbangan melalui kriteria eksklusi. Selanjutnya, sebanyak lima jurnal yang relevan dengan topik penelitian direview, dengan fokus pada jurnal yang diterbitkan dalam periode 2020–2024.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode sintesis untuk menggabungkan temuan-temuan utama dari jurnal yang relevan. Selain itu, teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul terkait dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah, guna memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap topik penelitian (Erbara & Takdir, 2022).

PEMBAHASAN

Kepemimpinan, SAP, dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepemimpinan dalam sektor publik memegang peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemimpin yang menjunjung nilai-nilai etika dan moral yang tinggi dapat memengaruhi pengikutnya untuk bertindak sesuai prinsip akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik, di mana pemimpin harus mampu membimbing pengikutnya menuju tujuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Destiana, 2023; Fanani et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas, karena dampaknya langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Edowati et al., 2021).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SAP yang diterapkan secara efektif mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Rosyidah, 2023; Wulandari, 2021). Transparansi laporan keuangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan baik (Leatemia & Usmany, 2021; Sari et al., 2020). Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif juga memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan dan mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel (Efendi. H, 2020; Fitrioso et al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik (Irma, 2022; Mada et al., 2017). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemimpin, aparatur pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah (Fitrioso et al., 2023; Nurhaeda & Tenriola, 2022).

Secara keseluruhan, penerapan SAP, pengembangan kepemimpinan yang baik, dan partisipasi masyarakat adalah tiga elemen kunci yang saling mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya memperkuat ketiga aspek ini harus menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Edowati et al., 2021; Nurhaeda & Tenriola, 2022; Wulandari, 2021).

Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Efektif

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur sipil negara dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan (Hendra et al., 2024). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat

mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al., 2023; Sari et al., 2020).

Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah juga berkontribusi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu mencerminkan kualitas informasi yang dapat diandalkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas (Rahmatullah et al., 2023; Rosyidah, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketika standar akuntansi diterapkan secara konsisten, hal ini berimplikasi positif terhadap kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas publik (Rahmatullah et al., 2023); (Wulandari, 2021). Dengan demikian, penerapan standar akuntansi yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah transparansi dalam laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berhubungan erat dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Agustini et al., 2020; Fanani et al., 2020; Leatemia & Usmany, 2021). Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan, mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas; (Fanani et al., 2020; Latifah, 2015). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh publik.

Dari perspektif kebijakan, penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Implementasi sistem akuntansi yang baik dan transparan akan mendukung akuntabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang baik berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien (Mada et al., 2017; Mariana et al., 2024). Dengan demikian, langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan diatas maka dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan partisipasi masyarakat merupakan tiga elemen kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemimpin yang menjunjung nilai etika mampu mendorong pengikut untuk bertindak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sementara penerapan SAP yang efektif memastikan kualitas laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel. Ketiga aspek ini harus diperkuat secara sinergis guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dan transparansi laporan keuangan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang kuat, kompetensi aparatur pemerintah, serta laporan keuangan yang transparan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memberi masukan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penerapan SAP dan penguatan sistem informasi

keuangan harus menjadi prioritas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, D., Lian, B., & Sari, A. P. (2020). 10967-Article Text-24671-28856-10-20200724. *Education*, 2(2), 160–173.
- Albugis, F. F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparency and Accountability in Local Government Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi... Jurnal EMBA*, 78(3), 78–089.
- Basak, R., Karlsson-Vinkhuyzen, S., & Termeer, K. J. A. M. (2022). Information for climate finance accountability regimes: Proposed framework and case study of the Green Climate Fund. *Public Administration and Development*, 42(5), 261–280. <https://doi.org/10.1002/pad.2000>
- Benito, B., Guillamón, M. D., & Bastida, F. (2016). The Impact of Transparency on the Cost of Sovereign Debt in Times of Economic Crisis. *Financial Accountability and Management*, 32(3), 309–334. <https://doi.org/10.1111/faam.12090>
- Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 437–460. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15762>
- Dewi, N. F. (2024). Peran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Keuangan. *Profjet*, 5(1), 1–23.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Efendi, H. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Yang Dimediasi Kompetensi Aparatur Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Action Research Literary*, 3(2), 142–154.
- Erbara, A., & Takdir, M. (2022). JIEE : Review : Administrasi Keuangan di Indonesia. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 1–10.
- Fanani, A. F., Iqbal, M. M., Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p84-90>
- Fitrios, R., Akbar, I., & Supriono. (2023). Pengaruh kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 646–655. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i2.3773>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>

- Irma, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Latifah, A. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 15.
- Leatemia & Usmany. (2021). 5248-Article Text-17934-1-10-20211126. 9(2), 119–130.
- Liza, L., & Mariana, M. (2023). Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures? *Journal of Data Acquisition and Processing*, 38(3), 5472–5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mariana, Abdullah, S., & Mahmud, M. (2020). Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia. *Technology and Investment*, 11(02), 13–21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>
- Mariana, M. (2024). Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Mariana, M., & Safrijal, S. (2024). Analisis Sistem Upah pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>
- Maulena, M., Kheriah, K., & Abral, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 81–89. www.depkeu.com
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>

- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmانيar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rosyidah, D. M. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 615–635. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.566>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Wulandari, N. D. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan. *Juripol*, 4(1), 128–137. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988>
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>